

SKRIPSI  
ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN BULUKUMBA

FITRIANI  
105730418113



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017

**SKRIPSI**  
**ANALISIS *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGUKURAN KINERJA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**KABUPATEN BULUKUMBA**

**FITRIANI**  
**105730418113**

*Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada  
Jurusan Akuntansi*

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**MAKASSAR**  
2017



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Fax. (0411)860 132 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul : **Analisis *Value for Money* dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**

Nama Mahasiswa : **FITRIANI**

NIM : **10573 04181 13**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Ahad, tanggal 08 Oktober 2017 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Oktober 2017

Menyetujui :

Pembimbing I

**Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A.**

NIDN: 0902025701

Pembimbing II

**Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA.**

NIDN: 0915058801

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

**Ismail Rasulong, S.E., M.M.**

NBM: 903.078

Ketua Jurusan Akuntansi

**Ismail Badollahi, S.E., M.Si. Ak. CA.**

NIDN: 0915058801

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama FITRIANI NIM. 10573 04181 13 ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: /Tahun 1439 H/2017 M dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari Ahad tanggal 08 Oktober 2017 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Muharram 1439 M  
08 Oktober 2017 H

### Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M. (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., M.M. (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. H. Sultan Sarda, S.E M.M. (.....)  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji: : 1. Drs. H. Sultan Sarda, M.M. (.....)  
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA. (.....)  
3. Abdul Salam HB., SE., M.Si. Ak. CA (.....)  
4. Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A. (.....)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini dapat tersusun atas bantuan dan perhatian berbagai pihak yang telah berbaik hati telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi serta senantiasa memberikan semangat sehingga konsistensi selalu terjaga selama penyusunan Skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si., Ak.,CA., Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si., Ak.,CA., Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengetahuan dengan segenap hati selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Orang tua tercinta penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dengan setulus hati. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan di rahmati oleh Allah SWT.
8. Saudara–saudaraku yang telah memberikan motivasi, perhatian, dukungan, dan doa semoga senantiasa diridhai Allah SWT.
9. Pimpinan dan Staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa Akuntansi angkatan 2013 yang senantiasa memotivasi dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap bahwa Skripsi ini dapat memberikan

manfaat untuk setiap jajaran, baik kepada teman-teman, perusahaan dan penelitian selanjutnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan Skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 September 2017

FITRIANI  
NIM. 105730418113

## ABSTRAK

**Fitriani. (2017) “Analisis *Value For Money* dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba”,** dibimbing oleh Dr. H. Mahmud Nuhung (Pembimbing I) dan Ismail Badollahi (Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2014 - 2016 ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan objek yang diteliti adalah data Realisasi Pencapaian Keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba yang terdapat pada LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2014 - 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas (3E) telah memenuhi syarat *value for money* dimana setiap elemen mencapai nilai rasio yang mencapai maksimal (100%) dan disertai pula penghematan anggaran setiap tahunnya (ekonomis). Pada tahun 2014 terjadi penghematan anggaran sebesar Rp.109.616.450,- dengan nilai rasio efisiensi yang diperoleh 104,38% dan nilai rasio efektivitas sebesar 100%. Di tahun 2015 total penghematan anggaran sebesar Rp. 20.816.400,- dengan nilai rasio efisiensi 101,90% dan nilai rasio efektivitas yaitu 99,96%. Sementara tahun 2016 total penghematan anggaran yaitu Rp. 326.319.250,- dengan nilai rasio efisiensi yang diperoleh 102,81% dan nilai rasio efektivitas 96,76%. Sehingga dapat dinyatakan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba selama periode 2014 – 2016 telah memenuhi syarat *value for money* dimana setiap anggaran yang dialokasikan mampu dikelola secara tepat dalam menjalankan setiap program kerja yang dimilikinya.

---

Kata kunci :kinerja, ekonomi, efisiensi, efektivitas, *value for money*.

## ABSTRACT

***Fitriani. (2017) "Analysis Of Financial Performance Using Value For Money Approach at Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba", Guided by Dr. H. Mahmud Nuhung (Mentor I) and Ismail Badollahi (Mentor II).***

*This study aims to determine the financial performance of Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba for the period of 2014 - 2016 in terms of economic elements, efficiency, and effectiveness. This research is a descriptive research with the object under study is the data of Realization of Financial Achievement of Animal Husbandry and Animal Health Office of Bulukumba found in LAKIP Department of Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba for the period of 2014 - 2016. Data analysis technique used is quantitative descriptive analysis on economic measurement, Efficiency, and effectiveness.*

*Based on the result of the research shows that the performance of Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba in terms of economic element, efficiency and effectiveness (3E) have fulfilled the value for money requirement in which each element reaches the maximum ratio (100%) and accompanied by annual budget savings (economical). In 2014 there is a budget savings of Rp 109,616,450 with the value of efficiency ratio obtained 104.38% and the value of the effectiveness ratio of 100%. In 2015 total budget savings of Rp 20,816,400 with efficiency ratio value 101,90% and value of effectiveness ratio that is 99,96%. While in 2016 total budget savings of Rp 326,319,250 with the value of efficiency ratio obtained 102.81% and the value of effectiveness ratio 96.76%. So it can be stated that the performance of Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba during period 2014 - 2016 has fulfilled the requirement of value for money where every budget allocated can be managed properly in running every work program it has.*

---

*Keywords : Performance, economy, efficiency, effectiveness, value for money*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Konsep Kinerja.....	11
B. Penilaian Kinerja .....	12
C. Indikator Kinerja.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja.....	17
E. Konsep <i>Value For Money</i> .....	20
F. Elemen – elemen <i>Value For Money</i> .....	22
G. Indikator Kinerja dalam Penilaian <i>Value For Money</i> .....	25

H. Manfaat Implementasi <i>Value For Money</i> .....	27
I. Penelitian Terdahulu.....	28
J. Kerangka Pikir.....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel.....	42
C. Metode Pengumpulan Data .....	43
D. Metode Analisis Data.....	43
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum .....	46
B. Visi dan Misi .....	48
C. Struktur Organisasi.....	48
D. Tugas dan tanggungjawab .....	51
E. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	65
F. Program danKegiatan .....	66
<b>BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Data .....	69
B. Pembahasan .....	75
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep <i>Value For Money</i> .....	22
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	41
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 5.1	Rekapitulasi Rasio Ekonomi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 – 2016 .....	70
Tabel 5.2	Rekapitulasi Rasio Efisiensi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 – 2016 .....	73
Tabel 5.3	Rekapitulasi Rasio Efektivitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 – 2016 .....	74
Tabel 5.4	Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 – 2016	80

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik pelaksanaan *good governance* yang diberikan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009), meliputi partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), orientasi kepentingan umum (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efisiensi dan efektivitas (*efficiency and effectiveness*), akuntabilitas (*accountability*), dan visi ke depan (*strategic vision*). Dalam konteks organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Mahmudi, 2007: 9).

Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilaksanakan organisasi publik.

Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Pengukuran kinerja juga merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian manajemen strategis. Hal ini penting karena pengukuran kinerja merupakan salah satu tahapan dalam siklus manajemen strategis. Dengan memahami siklus manajemen strategis tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran kinerja merupakan tahapan yang sangat vital bagi keberhasilan

implementasi manajemen strategis. Rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi membutuhkan wahana untuk mewujudkannya dalam bentuk aktivitas keseharian organisasi. Implementasi rencana strategis akan dapat mencapai kualitas yang diinginkan jika ditunjang oleh pola pengukuran kinerja yang berada dalam koridor manajemen strategis.

Hasil pengukuran kinerja sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja. Pembuatan laporan tersebut merupakan manifestasi dilakukannya akuntabilitas publik (Mahmudi, 2007:7). Kinerja organisasi sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat *output* yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja organisasi sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

Dalam rangka memperoleh hasil pengukuran yang objektif dan menyeluruh mencakup aspek yang bersifat *tangible* maupun *intangible* maka metode pengukuran kinerja harus didesain sedemikian rupa agar bisa representatif selain juga *applicable*. Ada beberapa alat dalam pengukuran kinerja, antara lain menggunakan metode *Balance Score Card* dan metode *Value for Money*. Dalam metode *Balance Score Card* terdapat empat perspektif yang dinilai yaitu perspektif keuangan (*financial*), perspektif konsumen (*customer*), perspektif proses bisnis/intern (*internal*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

(*growth and learn*), sedangkan dengan metode *Value for Money* terdapat tiga elemen utama yang dinilai yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

*Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik karena kinerja pemerintah tidak bisa dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Dari ketiga elemen pokok *Value for Money* tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup (Mardiasmo, 2009: 4). Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan berarti bahwa semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, tanpa diskriminasi atau hak istimewa bagi kelompok tertentu. Pemerataan atau kesetaraan berarti pemerintah harus menerapkan pemerataan

pelayanan kepada seluruh masyarakat, dengan mengutamakan pelayanan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) dengan judul penelitian “Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Value for money* dalam menilai kinerja pelayanan sektor publik pada Polres Ogan Ilir, untuk itu dalam menilai kinerja pelayanan sector publik konsep *value for money* menggunakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran Polres Ogan Ilir bagian SIM tahun 2011 sampai 2013, maka *value formoney* pada Polres Ogan Ilir sudah cukup baik karena Polres Ogan Ilir sudah memenuhi 2 elemen *value formoney* yaitu ekonomis dan efisien meskipun pada elemen efektif tidak efektif teknik pengukuran *Value for money* menunjukkan: rasio ekonomi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM ekonomis dalam merealisasikan pengeluaran karena rasionya kurang dari 100% kecuali pada tahun 2011. Rasio efisiensi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatannya.kecuali pada tahun 2011. Rasio efektifitas tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwakinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum tidak efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek yang diteliti, dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra

(2014) objek penelitiannya, yaitu Polres Ogan Ilir sebuah lembaga keamanan kemasyarakatan.

Sari (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010-2013, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu sebesar 88,02 %, 89,98 %, 89,77 % dan 90,68%. Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 selalu mengalami peningkatan yaitu 99,44%, 96,55%, 95,36%, 92,91% dan berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif hanya sebesar 99,95 % dan kurang dari 100%, namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 100,84 %, 101,21 % dan 101, 28 % dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip *value for money* adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek yang diteliti, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) objek penelitiannya, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Sulastiningsih (2015) dengan judul “Pengukuran Kinerja Berbasis *value For Money* Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara” penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan SMP Negeri 2 Banjarnegara dengan menggunakan metode *Value For Money*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Tingkat ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan tabel kriteria ekonomis kinerja keuangan berada pada kriteria kurang ekonomis. (2) Tingkat efisiensi yang dicapai menunjukkan nilai 100 %, berdasarkan nilai kriteria efisiensi kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien. (3) Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria efektivitas kinerja keuangan berada pada kriteria efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek yang diteliti, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulastingsih (2015) objek penelitiannya yaitu SMP Negeri 2 Banjarnegara yang merupakan sebuah instansi pendidikan di Banjarnegara.

Sektor peternakan merupakan salah satu andalan Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan kekhasan dan kondisi alam yang ada, Kabupaten Bulukumba memiliki potensi cukup besar untuk mengembangkan potensi sumber daya dalam hal peternakan, sehingga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba selaku organisasi sektor publik yang menangani masalah peternakan di Kabupaten Bulukumba telah menetapkan program-program untuk mendukung perkembangan peternakan tersebut. Program-program yang dibuat sesuai dengan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba yaitu,

meningkatkan profesionalitas aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Bulukumba, meningkatkan kemampuan dan keterampilan peternak, serta mendorong peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk peternakan melalui peningkatan ketersediaan dan optimasi pemanfaatan sarana/prasarana peternakan daerah, teknologi yang spesifik dan ramah lingkungan.

Berdasarkan tujuan Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba yang memberikan pelayanan di bidang peternakan, dan munculnya beberapa permasalahan dan keluhan, mengidentifikasi bahwa pelayanan yang diberikan Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba belum memenuhi kepuasan yang diharapkan sehingga perlu perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran kinerja Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Kinerja Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumbasering dinilai hanya dari aspek *input* dan *output*. Instansi ini dinilai cukup berhasil jika bisa menyerap anggaran 100% (*input*) dan melaksanakan program tahunan (*output*), tanpa ada penilaian terhadap aspek hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan juga dampak (*impact*). Oleh karena itu diperlukan ukuran nonfinansial dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik.

Dengan memperhatikan kinerja instansi pemerintah yang kian menjadi sorotan dan juga permasalahan peternakan yang ada di Kabupaten Bulukumba, maka

penulis tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba menggunakan metode *Value for Money*. Semua masalah inilah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi, sehingga penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian adalah :

Bagaimana kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan

pengukuran kinerja dengan analisis *Value for Money* dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan menjadi wahana dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari khususnya mengenai akuntansi sektor publik.

### b. Bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus umpan balik mengenai pengukuran kinerja kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan di masa depan dapat berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kinerja**

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Menurut Indra Bastian (2006:274), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Biasanya orang yang kinerjanya tinggi disebut sebagai orang yang produktif, tetapi sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau berkinerja rendah.

Menurut Moh Mahsun (2006) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Bab I, Pasal 1:37) menyebutkan pengertian kinerja sebagai berikut, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan, kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

## **B. Penilaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Mulyadi (2004:416) menjelaskan penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja merupakan suatu cara manajemen dalam menilai keefektifitasan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam sebuah anggaran. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai hasil kerja sehingga dapat membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Pengertian penilaian kinerja menurut Mahmudi (2007:6) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan

jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan”.

Penilaian kinerja digunakan untuk menilai kemajuan pekerjaan atas pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, termasuk informasi efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil dan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Penilaian kinerja adalah salah satu tugas penting untuk dilakukan oleh seseorang manajer atau pimpinan. Kegiatan penilaian ini penting, karena dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang kinerja mereka.

Penilaian prestasi kerja (*performance appraisal*) adalah proses oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan tertib maka akan dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas organisasional dari karyawan (Samsudin, 2006:159). Hal ini tentu saja akan menguntungkan organisasi yang bersangkutan. Paling tidak para karyawan akan mengetahui sampai dimana dan bagaimana prestasi kerjanya dinilai oleh atasan atau tim penilai. Kelebihan dan kekurangan yang ada dapat menjadi motivasi bagi kemajuan-kemajuan mereka pada masa yang akan datang.

Penilaian kinerja merupakan bagian dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dilakukan dengan cara menciptakan mekanisme *reward* dan *punishment*. Sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman

(*punishment*) digunakan sebagai pendorong bagi perencanaan strategi. Sistem penilaian kinerja dan mekanisme *rewards* dan *punishment* harus didukung dengan manajemen kompensasi yang memadai. Manajemen kompensasi merupakan mekanisme penting untuk mendorong dan memotivasi manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Insentif negatif jika tujuan tidak tercapai disebut hukuman (*punishment*). Peran penting adanya penghargaan (*reward*) dalam sebuah organisasi adalah untuk mendorong tercapainya tujuan organisasi dan untuk menciptakan kepuasan bagi setiap individu. Penilaian kinerja diperlukan untuk menentukan tingkat kontribusi individu atau tingkat kinerja individu. Tiga perangkat kinerja yang paling populer untuk menilai kinerja menurut Robbins (1997:259) yaitu:

1. Hasil tugas individu, dengan menggunakan hasil tugas, maka seseorang pimpinan dapat menilai tinggi rendah kinerja pegawainya.
2. Perilaku, dalam hal ini perilaku adalah kesegaran seseorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya.
3. Ciri, dalam hal ini ciri adalah sikap baik, percaya diri, kooperatif, dapat diandalkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

### **C. Indikator Kinerja**

Menurut Indra Bastian (2006 : 267), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan

(*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*), dimana Indra Bastian menjelaskan :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja menurut Indra Bastian (2006 : 267) adalah :

1. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
3. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.

4. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Apa yang diungkapkan Indra Bastian diatas, sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009 : 127) bahwa, “istilah indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja”. Yang mana, adapun peran indikator kinerja bagi pemerintah menurut beliau (2009 : 128) :

1. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi,
2. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan,
3. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial,
4. Memungkinkan bagi pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan,
5. Untuk menunjukkan standar kinerja,
6. Untuk menunjukkan efektivitas,
7. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan
8. Untuk menunjukkan wilayah, bagian, atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja**

Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan bagian penting dari proses pengendalian manajemen, baik sektor publik maupun swasta. Menurut De Bruijn (2002); dan Mahmudi (2007), tujuan pengukuran atau penilaian kinerja dalam sektor publik antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Ditinjau dari perspektif pengendalian internal, sistem pengukuran kinerja didesain untuk memonitor implementasi rencana-rencana organisasi, menentukan kapan rencana tersebut berhasil dan bagaimana cara memperbaikinya. Sistem pengukuran kinerja untuk memfokuskan perhatian pada pencapaian tujuan organisasi, mengukur dan melaporkan kinerja, serta untuk memahami bagaimana proses kinerja mempengaruhi pembelajaran organisasi.

2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai

Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.

3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya

Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi. Budaya kinerja

atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfir organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Atmosfir tersebut dapat terwujud dengan perbaikan kinerja yang dilakukan secara terus menerus. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang.

4. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment*

Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward* (kenaikan gaji, tunjangan, promosi), atau *punishment* (pemutusan kerja, penundaan promosi, teguran). Sistem manajemen kinerja modern diperlukan untuk mendukung sistem gaji berbasis kinerja (*performance based pay*). Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan *reward*, insentif, dan gaji yang memiliki hubungan yang jelas dengan *knowledge*, *skill*, dan kontribusi individu terhadap kinerja organisasi.

5. Memotivasi pegawai

Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi.

#### 6. Menciptakan akuntabilitas publik

Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2007), penilaian terhadap suatu kinerja bertujuan untuk:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Di samping tujuan pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat.

Manfaat pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2007:122) antara lain:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan target serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

#### **E. Konsep *Value For Money***

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*). Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur *output*, karena *output* yang dihasilkan tidak selalu berupa *output* yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output*.

Penilaian kinerja berdasarkan *value for money* menurut Mahmudi (2007:81) adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Karena pemerintah sebagai wakil rakyat yang dipercaya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Negara harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan dana publik apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

*Value for money* merupakan penghargaan terhadap nilai uang dan merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pengertian *value for money* menurut Bastian (2006:335) merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya.

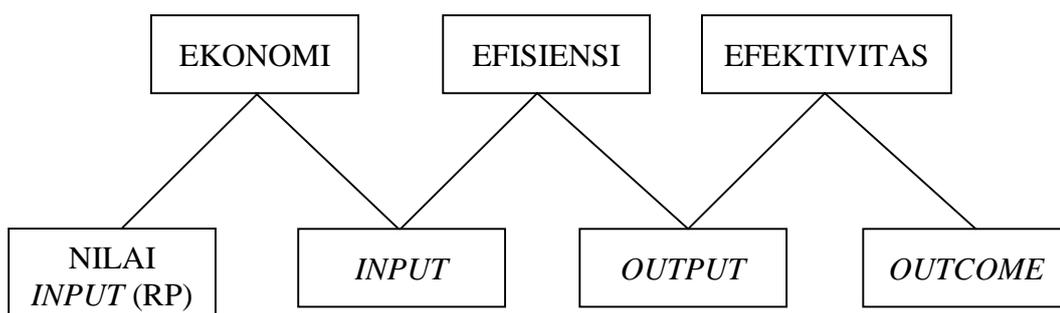
Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Berdasarkan ketiga elemen tersebut organisasi dapat mengukur tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Penilaian kinerja berdasarkan *value for money* dibangun atas tiga komponen utama (Mahmudi, 2007:93) yaitu sebagai berikut:

1. Komponen misi, visi, tujuan, sasaran dan target
2. Komponen *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*
3. Komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

## F. Elemen – elemen *Value For Money*

*Value for Money* menurut Mardiasmo (2009: 4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Secara skematis, *Value for Money* dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Konsep *Value For Money***

### 1. Ekonomi

Ekonomi merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi adalah seluruh sumber daya *input* diperoleh dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) yaitu harga yang mendekati pasar. Ukuran ekonomi berupa anggaran yang dialokasikan. Pengertian ekonomi (hemat atau tepat guna) sering disebut juga kehematan yang mencakup juga pengelolaan

secara hati-hati atau cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa seluruh sumber daya *input* tidak terjadi pemborosan.

## 2. Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisiensi apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Konsep efisiensi merupakan konsep yang bersifat relatif atau tidak absolut.

## 3. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (*spending wisely*). Karena *output* yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasikan, maka

pengukuran efektivitas sering mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut adalah karena pencapaian hasil (*outcome*) tidak bisa diketahui dalam jangka pendek akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir sehingga ukuran efektivitas biasanya dapat dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan (*judgment*).

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

Tingkat *input*, *output*, dan *outcome* harus diketahui terlebih dahulu agar dapat mengukur ekonomi, efisien dan efektivitas pada penilaian kinerja berdasarkan *value for money*. Tahap pertama organisasi harus membuat indikator *input*, *output*, dan *outcome* kemudian tahap berikutnya adalah pengukuran *input*, *output*, dan *outcome* tersebut. Indikator kinerja harus dikaitkan dengan pencapaian kinerja, tujuan, visi, dan misi organisasi. Konsep dasar *input*, *output*, dan *outcome*, yaitu sebagai berikut:

### 1. *Input*

*Input* merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas. Contoh *input* diantaranya seperti dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah, dan sebagainya. *Input* dapat dinyatakan secara kuantitatif, misalnya jumlah dokter, luas tanah, jumlah guru, dan sebagainya. *Input* dapat pula dinyatakan dalam bentuk uang, misalnya biaya dokter, harga tanah, gaji guru, dan sebagainya. Masalah yang terjadi dalam *input* adalah metode penentuan harga.

### 2. *Output*

*Output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Ukuran *Output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Mengukur *output* lebih sulit dilakukan terutama untuk pelayanan sosial seperti pendidikan, keamanan atau kesehatan.

### 3. *Outcome*

*Outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* seringkali dikaitkan dengan tujuan (*objectives*) atau target yang dikehendaki.

## **G. Indikator Kinerja dalam *Value For Money***

Pada organisasi pemerintah *value for money* merupakan inti dari penilaian kinerja. Kinerja instansi pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity & service coverage*).

Istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu diketahui indikator-indikator sebagai dasar penilaian kinerja. Mekanisme untuk menentukan kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan dan pengendalian.
2. Spesifikasi teknis dan standardisasi.
3. Kompetensi teknis dan profesionalisme.
4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar.
5. Mekanisme sumber daya manusia.

Permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran *value for money* organisasi adalah bagaimana membandingkan *input* dengan *output* untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika *output* yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar. Solusi praktis atas masalah tersebut adalah dengan cara membandingkan *input* finansial (biaya) dengan *output* nonfinansial, misalnya biaya unit (*unit cost statistic*). *Unit cost statistic* tersebut dapat digunakan sebagai benang merah untuk mengukur kinerja. Unit-unit kerja pemerintah dapat menghasilkan sejumlah *unit cost statistic* yang spesifik untuk unit kerjanya.

## H. Manfaat Implementasi *Value For Money*

Penerapan konsep *Value for Money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *Value for Money* pada organisasi sektor publik yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo 2009: 130).

Manfaat lain dari implementasi konsep *Value for Money* antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009:7).

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value for Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

## **I. Penelitian Terdahulu**

Adanya penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya berperan sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Karena dengan adanya penelitian sebelumnya maka penulis saat ini dapat terbantu dalam penulisan penelitian yang akan dihadapi. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2014) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan *Value For Money Audit* Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan nilai untuk uang yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu: (1) ekonomi, (2) efisiensi, dan (3) efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang difokuskan pada kinerja dalam memungut PAD. Hasil penelitiannya menunjukkan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.

Sulastiningsih (2015) dengan judul “Pengukuran Kinerja Berbasis *value For Money* Studi pada SMP Negeri 2 Banjarnegara” penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan SMP Negeri 2 Banjarnegara dengan menggunakan metode *Value For Money*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1) Tingkat

ekonomis yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan tabel kriteria ekonomis kinerja keuangan berada pada kriteria kurang ekonomis. (2) Tingkat efisiensi yang dicapai menunjukkan nilai 100 %, berdasarkan nilai kriteria efisiensi kinerja keuangan berada pada kriteria kurang efisien. (3) Tingkat efektivitas yang dicapai menunjukkan nilai 96,19 %, berdasarkan nilai kriteria efektivitas kinerja keuangan berada pada kriteria efektif.

Ardila (2015) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan *Value For Money* Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan pendekatan *value for money (VMM)*, yaitu dengan pengukuran 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada tahun 2010 sampai dengan 2013, analisis rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 102.27% berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja negara tidak ekonomis karena belum memenuhi standar ekonomis VFM. Analisis rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 107.69% berada diatas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi menyebabkan rasio tidak memenuhi standar efisien VFM dan menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana anggaran belanja untuk mencapai program kerjanya masih belum tepat guna. Sedangkan pada rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72.05% berada dibawah 100%, sudah memenuhi standar efektivitas. Rasio efektivitas mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jasa yang diberikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah terpenuhi.

Liando, dkk (2014) dengan judul penelitian yaitu “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value For Money*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2012 sampai 2013 dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *value for money* untuk mengukur kinerja keuangan dari segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam laporan realisasi anggaran tahun 2012 dan tahun 2013. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengoptimisasi anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran, dari segi efisiensi harus ditingkatkan lagi sehingga masyarakat merasakan hasil otonomi terutama nominal anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat, dan dari segi efektivitas Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat diperbaiki dengan upaya adanya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Putra (2015) dengan judul penelitian “Penilaian Kinerja Berbasis *Value For Money* Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan atas penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2013 berdasarkan variabel ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dilihat dari segi efisiensi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan untuk pemungutan PAD dari tahun 2010-2013 telah memenuhi kriteria sangat efisien, karena selama empat tahun ini berada

pada prosentase kurang dari atau dibawah 60 % (*spending well*). pada efektifitas kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan untuk pemungutan PAD dari tahun 2010-2013 telah memenuhi kriteria sangat efektif karena selama empat tahun ini berada pada persentase melebihi 100 % (*spending wisely*).

Septianita (2016) dengan judul penelitian “Analisis *Value For Money* Dalam Mengukur Kinerja Usaha Jamur Tiram (*Pleurotus Ostreatus*)(Studi Kasus Di Pengusaha Jamur Tiram Desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung besarnya biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan efisiensi usaha jamur tiram di desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang menggunakan perspektif *value for money*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015 s/d Januari 2016 di Desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Analisis data yang digunakan adalah analisis biaya produksi, analisis penerimaan dan pendapatan serta analisis efisiensi usaha. Hasil penelitiannya menunjukkan (a) Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani adalah Rp 7.923.914/Ut, (b) Rata-rata penerimaan yang diterima oleh petani adalah Rp 19.500.000,00,-/Ut, (c) Rata-rata pendapatan yang diterima petani adalah Rp 11.576.086/Ut. R/C ratio menunjukkan angka 2,46. Berdasarkan kriteria R/C ratio > 1 berarti usaha tani tersebut efisien dan menguntungkan.

Kadafi (2012) dengan judul penelitian “Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan *Value For Money* Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang melalui pendekatan *Value*

ForMoney. Dalam penelitian ini, perpengukuran nilai ekonomi, menggunakan perbandingan input dan biaya input, nilai efisiensi menggunakan perbandingan output dan input, sedangkan nilai efektivitas dihitung berdasarkan perbandingan nilai outcome dan output, dimana nilai outcome berisi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner kepada masyarakat Kota Tanjungpinang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat ekonomi dan efisiensi telah tercapai, Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang dapat mencapai hasil yang sangat efisien dan ekonomis. Namun, tingkat efektivitas program masih kurang sehingga dapat disimpulkan efektivitas dari program – program yang langsung menyentuh masyarakat sudah maksimal.

Meri (2013) dengan judul penelitian “Analisis *Value For Money* dan Akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan publik pada PDAM Tirta Musi Palembang”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Value For Money* dan Akuntabilitas dapat meningkatkan pelayanan public. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran perusahaan pada tahun 2010 sampai 2012, maka *valuefor money* pada PDAM Tirta Musi Palembang tidak berjalan dengan baik karena tidak memenuhi ketiga elemen tersebut. *valuefor money* dalam penelitian ini dapat dikategorikan tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif. Pertama, tidak ekonomis karena setiap tahunnya perhitungan anggaran tersebut meningkat. Pada tahun 2010 jumlah anggaran Rp142.789.704.382.000, lalu tahun 2011 menjadi Rp164.906.168.411.000, kemudian tahun 2012 mengalami kenaikan lagi Rp 209.834.161.868.000 itu berarti adanya pemborosan, perusahaan tidak mampu menghilangkan

ataumengurangi biaya yang tidak perlu.Lalu kedua, tidak efisien karenarealisasi anggaran lebih besar darianggaran perusahaan, dilihat dari presentase perbandingan, jikapersentase lebih dari 100% makarealisasi anggaran lebih besar darianggaran dan sebaliknya. Pada tahun2010 mencapai 129,67% , lalu tahun2011 menjadi 122,53%, dan tahun 2012 menjadi 111,17%. Kemudianyang terakhir, tidak efektif karenatidak mencapai sasaran atau misiperusahaan itu sendiri yaitumengutamakan mutu dan pelayanandemi kepuasan masyarakat.

Putra (2014) dengan judul penelitian “Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Value for money* dalam menilai kinerja pelayanan sektor publik pada Polres Ogan Ilir, untuk itu dalam menilai kinerja pelayanan sector publik konsep value for money menggnakan tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran Polres Ogan Ilir bagian SIM tahun 2011 sampai 2013, maka *value formoney* pada Polres Ogan Ilir sudah cukup baik karena Polres Ogan Ilir sudah memenuhi 2 elemen *value formoney* yaitu ekonomis dan efisien meskipun pada elemen efektif tidak efektif teknik pengukuran *Value for money* menunjukkan: rasio ekonomi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM ekonomis dalam merealisasikan pengeluaran karena rasionya kurang dari 100% kecuali pada tahun 2011.Rasio efisiensi tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa kinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum cukup efisien karena realisasi biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi

pendapatannya.kecuali pada tahun 2011. Rasio efektifitas tahun 2011 sampai dengan 2013 menunjukkan bahwakinerja Polres Ogan Ilir pada bagian SIM secara umum tidak efektif karena hasil rasionya kurang dari 100%.

Sari (2014) dengan judul penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep tahun 2010-2013, dengan menggunakan teknik perhitungan rasio ekonomis menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, yaitu sebesar 88,02 %, 89,98 %, 89,77 % dan 90,68%. Rasio efisiensi pada Kabupaten Sumenep periode 2010-2013 selalu mengalami peningkatan yaitu 99,44%, 96,55%, 95,36%, 92,91% dan berada pada kategori efisien. Sedangkan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2010 tidak efektif hanya sebesar 99,95 % dan kurang dari 100%, namun pada tahun 2011 hingga 2013 rasio efektifitas mengalami peningkatan sebesar 100,84 %, 101,21 % dan 101, 28 % dan berada pada kategori efektif, artinya pemerintah daerah dapat memperbaiki kinerja pemerintahannya secara efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 dengan menggunakan prinsip *value for money* adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu di atas, selanjutnya akan di tampilkan dalam bentuk tabel ringkasan sebagai berikut :

No.	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	I Desak Made Ita Purnamasari (2014)	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan <i>Value For Money Audit</i> Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011	Metode Deskriptif kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas berada pada kriteria sangat efektif.
2	Sulastiningsih (2015)	Pengukuran Kinerja Berbasis <i>Value For Money</i> Studi Pada SMP Negeri 2 Banjarnegara	Metode Deskriptif kuantitatif	Dari pengukuran kinerja sekolah berbasis <i>value for money</i> pengelolaan keuangan di SMP Negeri 2 Banjarnegara Tahun 2010/2011 diperoleh hasil sebagai berikut: kinerja keuangan berada pada kriteria kurang ekonomis, kurang efisien sedangkan kriteria efektivitas kinerja keuangan berada pada kriteria efektif.
3	Isna Ardila (2015)	Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan <i>Value For Money</i> Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Metode Deskriptif kuantitatif	Pada tahun 2010 sampai dengan 2013, analisis rasio ekonomis mengalami peningkatan sebesar 102.27% berada di atas 100%, ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja negara tidak ekonomis. Analisis rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 107.69% berada di atas 100%, menunjukkan bahwa dalam penggunaan dana anggaran belanja untuk mencapai program kerjanya masih belum tepat guna. Sedangkan pada rasio efektivitas mengalami peningkatan sebesar 72.05% berada di bawah 100%, sudah memenuhi standar

				efektivitas.
4	Harry Saputra Liando(2014)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode <i>Value For Money</i>	Metode Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mengoptimalkan anggaran harus lebih hemat dan tepat sasaran. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat diperbaiki dengan upaya adanya peningkatan secara berkesinambungan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5	Agus Purnomo Adi Putra (2015)	Penilaian Kinerja Berbasis <i>Value For Money</i> Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan	Metode Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan dari tahun 2010 sampai 2013 berdasarkan <i>value for money</i> untuk penerimaan PAD adalah baik, karena memenuhi kriteria ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
6	Dian Septianita (2016)	Analisis <i>Value For Money</i> Dalam Mengukur Kinerja Usaha Jamur Tiram ( <i>Pleurotus Ostreatus</i> )	Metode Analisis Statistik Deskriptif	Dari Hasil Penelitian Usaha Tani Jamur Di Desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Dapat Disimpulkan Bahwa : (1) Rata-Rata Biaya Produksi Yang dikeluarkan Oleh Petani Adalah Rp 7.923.914/Ut. (2) Rata-Rata Penerimaan Yang Diterima Oleh Petani Adalah Rp 19.500.000,00,-/Ut. (3) Rata-Rata Pendapatan Yang Diterima Petani Adalah Rp11.576.086/Ut. R/C Ratio Menunjukkan Angka 2,46. Berdasarkan Kriteria R/C Ratio > 1 Berarti Usaha Tani Tersebut Efisien Dan Menguntungkan.
7	Laode Kadafi (2012)	Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan <i>Value For</i>	Metode Deskriptif Kuantitatif	Penulis Menyimpulkan Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan <i>Value For Money</i> Pada Badan Lingkungan Hidup

		<i>Money</i> Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang		KotaTanjungpinang Telah Sesuai Dengan <i>Value For Money</i>
8	Afsita Meri (2013)	Analisis <i>Value For Money</i> dan Akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan publik pada PDAM Tirta Musi Palembang	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa <i>value for money</i> pada perusahaan tidak berjalan dengan baik karena tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif. Lalu, akuntabilitas pada perusahaan sudah cukup baik
9	Renaldi Putra (2014)	Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir	Metode Deskriptif Kuantitatif	Berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran Polres Ogan Ilir bagian SIM tahun 2011 sampai 2013, maka <i>value for money</i> pada Polres Ogan Ilir sudah cukup baik karena Polres Ogan Ilir sudah memenuhi 2 elemen <i>value for money</i> yaitu ekonomis dan efisien meskipun pada elemen efektif belum efektif.
10	Nindy Cahya Feriska Sari (2014)	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip <i>Value For Money</i> (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Metode Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik

## J. Kerangka Pikir

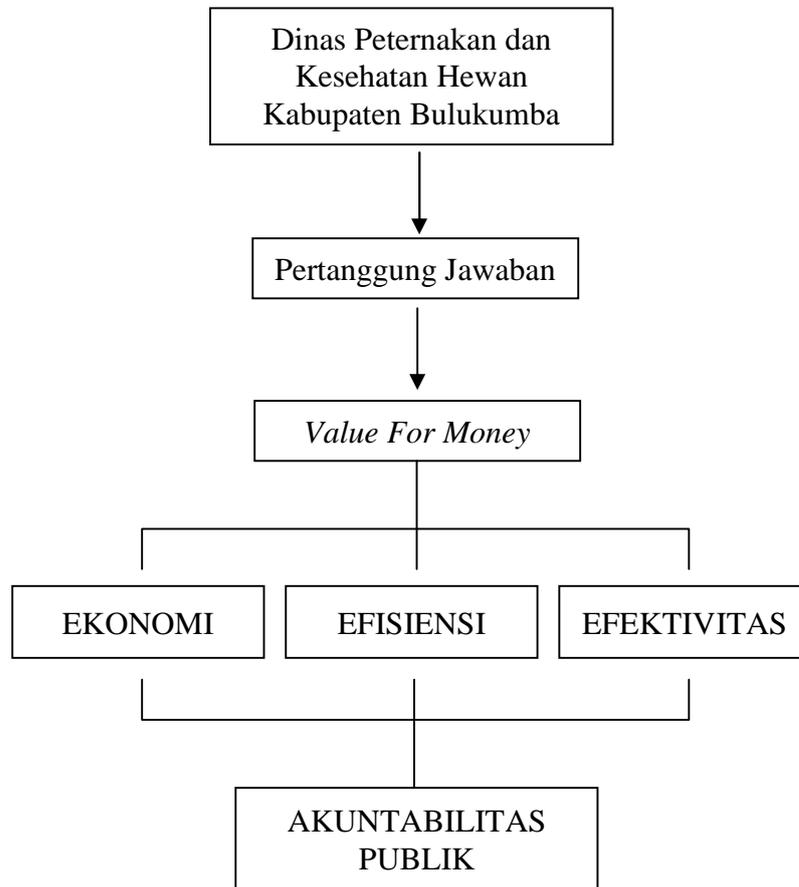
Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. Pengukuran kinerja pada organisasi organisasi sektor publik tidak hanya berdasarkan pada ukuran finansial saja tetapi juga pada ukuran non-finansial karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, *output* yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya bersifat *intangibile*, sehingga perlu adanya ukuran non-finansial yang dapat mencerminkan besarnya *output* yang dihasilkan.

*Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penjelasan dari masing-masing elemen sebagai berikut:

1. Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (*input*) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisien merupakan perbandingan *output* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu organisasi sektor publik yang membidangi masalah peternakan di Kabupaten Bulukumba, juga memerlukan pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumbasing dinilai hanya dari aspek *input* dan *output*. Instansi ini dinilai cukup berhasil jika bisa menyerap anggaran 100% (*input*) dan melaksanakan program tahunan (*output*), tanpa ada penilaian terhadap aspek hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan juga dampak (*impact*). Oleh karena itu diperlukan ukuran nonfinansial dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja dengan metode *Value for Money*, *input*, *output*, dan *outcome* dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kinerja, sehingga dapat diketahui tingkat kinerja ditinjau dari sisi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang telah dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba.

Untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang di bahas. adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan pada model berikut ini :

**Gambar 2.2****Kerangka Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan yaitu di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, dan waktu penelitian yang digunakan kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan Maret s/d bulan April 2017.

#### **B. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Menurut Sudjana (2005:6) Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran (LRA), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2014 sampai dengan 2016.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian atau hasil dari populasi yang diteliti (Arikunto,2007:117). Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan cara sampel berurutan dengan *observasi kontinue* yaitu mengadakan analisa terhadap laporan realisasi anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumbadari tahun ke

tahun, sehingga diperoleh informasi yang cukup untuk menggambarkan kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba tahun 2014 sampai dengan 2017. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran, data pengukuran kinerja dan data realisasi pendapatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba tahun 2014 sampai dengan 2016.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan dokumen perusahaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan khususnya laporan realisasi anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan (Mardiasmo:2002) adalah sebagai berikut:

#### **1. Rasio Ekonomi**

Mardiasmo (2009: 4) menyebutkan bahwa ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan *input value*. *Input* dalam hal ini adalah target anggaran, sedangkan *input value* adalah realisasi anggaran. Indra Bastian (2006:

280) mencontohkan biaya pembangunan rumah sakit dapat dikatakan ekonomis jika biaya yang digunakan dalam pembangunan lebih rendah dari yang sesungguhnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* sesuai dengan yang ditetapkan. Dari penjelasan tersebut, secara matematis pengukuran ekonomi dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \text{Target Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran}$$

## 2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar rasio tersebut maka semakin efisien suatu organisasi (Indra Bastian 2006: 280). Mardiasmo (2009: 133) merumuskan efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100$$

Keterangan :

Output : Keluaran yang dicapai dalam suatu program/kegiatan.

Input : Segala sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah program/kegiatan.

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

<b>Persentase</b>	<b>Penilaian</b>
90 – 100	Sangat Efisien
80 – 90	Efisien
70 – 80	Cukup Efisien
60 – 70	Kurang Efisien
< 60	Tidak Efisien

Sumber : Metode penelitian kuantitatif (Prasetyo, dkk, 2010:110)

### 3. Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009: 134). Rasio efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target}} \times 100$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan kemudian diklasifikasikan sesuai persentase penilaian sebagai berikut :

<b>Persentase</b>	<b>Penilaian</b>
90 – 100	Sangat Efektif
80 – 90	Efektif
70 – 80	Cukup Efektif
60 – 70	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber : Metode penelitian kuantitatif (Prasetyo, dkk, 2010:110)

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah daerah kabupaten Bulukumba yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah (*Perda*) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas untuk melaksanakan pembangunan sub sektor peternakan di Kabupaten Bulukumba yang didalamnya terdiri beberapa kegiatan

utama berupa budidaya, perbibitan, pencegahan penyakit serta peningkatan produktifitas ternak maupun pengembangan kapasitas peternak.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba juga mempunyai 2 Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bulukumba Nomor :62/XI/2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ini dibentuk sebagai upaya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan hewan, peningkatan kesehatan veteriner serta keamanan bahan pangan asal hewan.

Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut PUSKESWAN diberikan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan;
- b. Pelaksanaan konsultasi veteriner;
- c. Pelaksanaan penyuluhan dibidang kesehatan.

Susunan organisasi Unit Pelaksana Tekhnis PUSKESWAN terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan (RPH) Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan pengelolaan

Rumah Potong Hewan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT Rumah Potong Hewan (RPH) diberikan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan teknis RPH;
- b. Pelaksanaan peningkatan pelayanan RPH;
- c. Pelaksanaan penyediaan produk yang aman, sehat, utuh dan halal bagi konsumen.

## **B. Visi dan Misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**

### **1. Visi**

Mewujudkan Peternakan tangguh, berdaya saing, berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, sebagai penggerak perekonomian regional.

### **2. Misi**

Mendorong peningkatan produksi, kualitas, dan nilai tambah produk Peternakan melalui peningkatan SDM, ketersediaan dan optimasi sarana dan prasarana Peternakan, teknologi yang spesifik, inovatif, kreatif dan ramah lingkungan.

## **C. Struktur Organisasi**

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

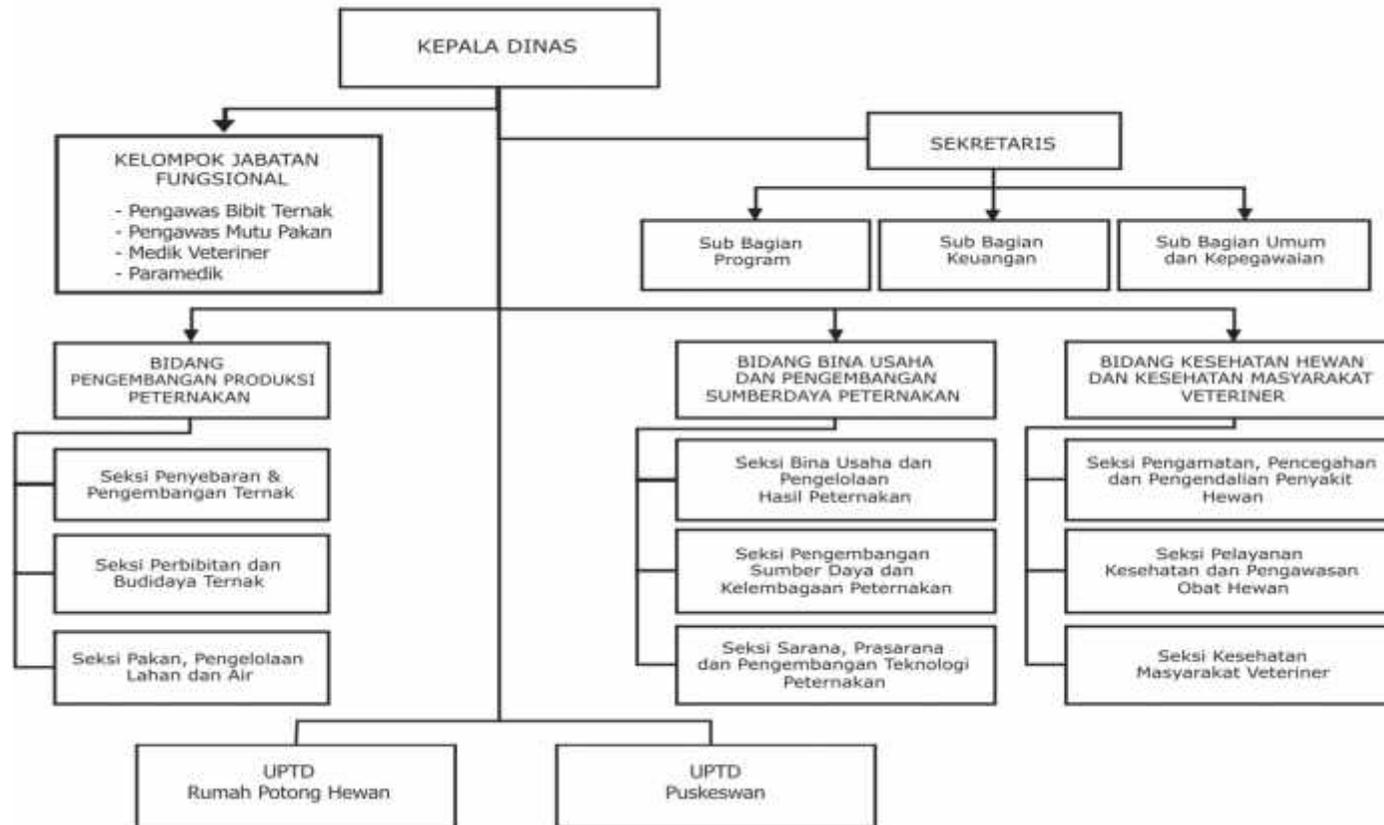
1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang;

4. Seksi/Sub Bagian;
5. Unit pelaksana teknis;
6. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Bulukumba dapat di gambarkan sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba (2017)

#### **D. Tugas Pokok dan Tanggungjawab**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tugas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba maka ditetapkanlah Tugas pokok, uraian tugas jabatan sruktural dan uraian kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor : 37/IX/2008 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

##### **1. Kepala Dinas**

###### **Tugas Pokok**

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

###### **Uraian Tugas :**

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan Pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c. Menyelenggarakan pengeloaan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Bulukumba
- d. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- e. Mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- f. Menyelenggarakan urusan umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- h. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- i. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- j. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

## **2. Sekretaris**

### Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. Melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- c. Merumuskan penyusunan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3. Sub Bagian Program**

#### Tugas Pokok

Membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program;
- b. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Melaksanakan pengelolaan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Sub Bagian Keuangan**

##### Tugas Pokok

Membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

##### Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

### Tugas Pokok

Membantu Sekretaris dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Umum dan Kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan Sub bagian umum dan kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Bidang Pengembangan Produksi Peternakan**

### Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan produksi peternakan dan Kesehatan Hewan.

Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Produksi Peternakan;
- b. Melaksanakan pengelolaan bidang pengembangan produksi peternakan;
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pengembangan Produksi Peternakan;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan pengembangan produksi peternakan;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **7. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak**

Tugas Pokok

Menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penyebaran dan pengembangan ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sistim Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan pengelolaan penyebaran dan pengembangan ternak;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **8. Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak**

### Tugas Pokok

Membantu kepala bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Perbibitan dan Budidaya Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Perbibitan dan Budidaya ternak;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perbibitan dan budidaya ternak;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan perbibitan dan budidaya ternak;

- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan perbibitan dan budidaya ternak;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **9. Seksi Pakan dan Pengelolaan Lahan dan Air**

### Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pakan dan pengelolaan lahan dan air Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pakan dan pengolahan lahan dan air;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi pakan dan pengolahan lahan dan air;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan Pakan dan pengolahan dan air;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan seksi pakan dan pengolahan lahan dan air;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **10. Bidang Bina Usaha Dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan**

### Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Bina Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Peternakan;
- b. Melaksanakan pengelolaan bidang Bina usaha dan pengembangan sumber daya peternakan;
- c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis Bidang Bina Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Peternakan;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Usaha dan Pengembangan Sumberdaya Peternakan;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan kepada bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **11. Seksi Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Peternakan**

### Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang dalam Menyusun program, Kegiatan, Petunjuk Teknis, Memantau dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Bina Usaha dan Pengelolaan Hasil Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Bina usaha dan pengelolaan hasil peternakan;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi Bina usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan Bina usaha dan hasil peternakan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan seksi Binas usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **12. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan**

### Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang dalam Menyusun program, Kegiatan, Petunjuk Teknis, Memantau dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **13. Seksi Sarana, Prasarana dan Pengembangan Teknologi Peternakan**

Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang dalam Menyusun program, Kegiatan, Petunjuk Teknis, Memantau dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Seksi Sarana, Prasarana dan Pengembangan Teknologi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi sarana prasarana dan pengembangan teknologi peternakan;

- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi sarana prasarana dan pengembangan teknologi peternakan;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan Bina usaha dan hasil peternakan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan seksi sarana prasarana dan pengembangan teknologi peternakan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **14. Bidang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

##### Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan.

##### Uraian Tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. Merumuskan dan/atau petunjuk teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
- f. Pemantauan dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **15. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan**

##### Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang dalam Menyusun program, Kegiatan, Petunjuk Teknis, Memantau dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Pengamatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

##### Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi Pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan Pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- f. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan seksi Pengamatan, pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **16. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat Hewan**

### Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi Pelayanan kesehatan dan pengawasan obat hewan;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi Pelayanan kesehatan dan pengawasan obat hewan;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan Pelayanan kesehatan dan pengawasan obat hewan;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan seksi Pelayanan kesehatan dan pengawasan obat hewan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **17. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner**

### Tugas Pokok

Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

### Uraian Tugas :

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. Melaksanakan tugas pengelolaankesehatan masyarakat veteriner;
- e. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **E. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi sebagai pelaksana serta pengelola program dan kegiatan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba memiliki personil dengan jumlah yang terbatas namun tetap berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba berjumlah 48 (Empat Puluh Delapan) yang terdiri dari 32 (Tiga Puluh Dua) orang laki-laki dan 16 (Enam Belas) orang perempuan dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

#### **F. Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**

Dalam melaksanakan kinerja setiap tahunnya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba selalu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Rencana tersebut bertujuan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu 2014 – 2016. Sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba 2014 – 2016 yaitu :

##### **1. Program Peningkatan Produksi Peternakan**

Kegiatan-kegiatan yang menunjang program peningkatan produksi adalah :

- a. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
- b. Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan ternak
- c. Pembibitan dan perawatan ternak
- d. Pendataan masalah peternakan
- e. Penataan ternak pemerintah
- f. Penyediaan dan pengembangan pakan dan air

##### **2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

- a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
- b. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
- c. Penanganan gangguan reproduksi dan penyakit ternak
- d. Pengawasan ternak keluar antar daerah.

**3. Program Peningkatan Mutu Layanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)**

Kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan adalah :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana Puskeswan
- b. Peningkatan pengelolaan informasi veteriner
- c. Peningkatan pengamanan dan pengendalian penyakit hewan strategis

**4. Program Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan Asal Hewan.**

Dalam kurun 5 tahun ke depan, kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk menunjang program ini adalah :

- a. Pengawasan praktek higiene sanitasi dari produsen produk pangan asal hewan
- b. Pengawasan peredaran produk pangan dan non pangan asal hewan
- c. Pengawasan lalu lintas produk pangan asal hewan
- d. Pengawasan kandungan residu bahan tambahan berbahaya dalam pangan asal hewan.
- e. Rehabilitasi/Perbaikan sarana dan prasarana RPH
- f. Pengembangan layanan kesejahteraan hewan
- g. Pengawasan dan pengendalian pematangan betina produktif.

**5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan**

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah

- a. Pengembangan agribisnis peternakan
- b. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

**6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan**

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna
- b. Pengembangan teknologi pemanfaatan limbah peternakan
- c. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak
- d. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

## BAB V

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penelitian ini akan mengukur kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bulukumba periode tahun 2014 - 2016 menggunakan tiga elemen yang diteliti yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikut ini analisis data yang digunakan pada masing-masing elemen :

##### 1. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga *input* yang sesungguhnya diperlukan.

Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen ekonomi, maka disajikan deskripsi data dari program kerja yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bulukumba periode tahun 2014 - 2016. (Tabel I pada lampiran)

Dari tabel I yang terdapat di lampiran dapat diketahui bahwa tahun 2016 memiliki penghematan anggaran yang paling besar yakni sebesar Rp. 326,319,250,- atau sekitar 94,11 % dari total anggaran yang disediakan dengan jumlah program kerja 6 (enam). Pada tahun 2014 terjadi penghematan anggaran sekitar 95,81 % dari total anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.109,616,450,- dengan jumlah program kerja 4 (empat) sementara tahun 2015 merupakan tahun dengan penghematan anggaran yang terkecil dengan program kerja 5 (lima), yaitu sebesar Rp.20,816,400,- atau sekitar 98,10 % dari total anggaran yang disediakan.

Dari uraian di atas dapat ditampilkan dalam tabel 5.1 rekapitulasi rasio ekonomi program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba tahun 2014 – 2016, sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Rekapitulasi Rasio Ekonomi**  
**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2014 - 2016**

Tahun	Rasio Ekonomi (Rp)			Persentase (%)
	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
2014	1,962,137,000	1,852,520,550	109,616,450	5.59
2015	3,146,773,976	3,125,957,576	20,816,400	0.66
2016	3,876,336,500	3,550,017,250	326,319,250	8.42

Sumber : LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, diolah

Berdasarkan tabel 5.1 di atas diketahui bahwa pengelolaan anggaran program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya terjadi penghematan anggaran yang berarti telah memenuhi syarat elemen ekonomis. Hal ini dapat diketahui dengan melihat jumlah sisa anggaran

tiap tahunnya meskipun masih berfluktuasi karena adanya perbedaan jumlah program kerja tiap tahunnya.

Dari tabel 5.1 di atas juga diketahui bahwa tahun 2016 merupakan tahun dengan penghematan anggaran terbesar, meskipun jumlah program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba saat itu mencapai 6 program kerja, sementara tahun 2015 merupakan tahun dengan penghematan anggaran yang paling rendah, hampir seluruh anggaran terealisasi secara maksimal untuk mencapai semua program kerja saat itu yang berjumlah 5 program kerja. Tahun 2014 terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 109.616.450,- dari total seluruh anggaran yang tersedia, dengan jumlah program kerja 4.

## 2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* (keluaran) yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Semakin besar *output* yang dihasilkan dibanding *input* yang digunakan, maka semakin besar tingkat efisiensi suatu organisasi.

Data *input* dan *output* dalam penelitian ini diperoleh dari data Pencapaian Realisasi Keuangan yang terdapat di LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bulukumba. Nilai *input* didapat dari persentase anggaran yang digunakan untuk menghasilkan *output*, sedangkan nilai *output* didapat dari persentase pencapaian fisik pada setiap kegiatan.

Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen efisiensi, maka disajikan deskripsi data dari program – program kerja yang terdapat pada Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Bulukumba periode tahun 2014 - 2016. (Tabel II pada lampiran)

Berdasarkan data tabel II yang terdapat pada lampiran menunjukkan bahwa program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba periode 2014 – 2016 telah terlaksana secara efisien, hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata rasio efisiensi tiap tahunnya berada di atas 100 % dan hampir tiap program kerja mencapai *output* maksimum (100%). Dari tabel di atas diketahui tahun 2014 mencapai tingkat efisiensi tertinggi yaitu 104,38 % dan dapat mencapai *output* maksimum tiap semua programnya mencapai 100 % dengan 4 program kerja. Tahun 2015 terjadi penurunan tingkat efisiensi dari tahun sebelumnya, yaitu 101,90 (< 2,48) hal ini karena adanya penambahan program kerja baru (5 program) dan ada beberapa program yang nilai *output*-nya tidak mencapai tingkat maksimal (100%). Meskipun demikian, nilai rata-rata rasio efisiensi tetap di atas 100%. Pada Tahun 2016 terjadi peningkatan nilai efisiensi meski tidak signifikan (> 0,91%), yaitu 102,81 %, diikuti dengan peningkatan program kerja yang mencapai 6 program kerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditampilkan dalam tabel 5.2 rekapitulasi rasio efisiensi program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba tahun 2014 – 2016, sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Rekapitulasi Rasio Efisiensi**  
**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2016**

T A H U N	Rasio Efisiensi (%)		
	Input	Output	Efisiensi
2014	95.81	100.00	104.38
2015	98.10	99.96	101.90
2016	94.11	96.76	102.81

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, diolah (2017)

Dari tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba periode 2014 – 2016 memenuhi elemen efisiensi, hal ini dilihat dari rata-rata rasio efisiensi tiap tahunnya > 100 % meski nilai *output* tiap tahunnya belum mencapai nilai maksimumnya (100%). Hal tersebut disebabkan adanya penambahan program kerja tiap tahunnya dan penurunan nilai maksimum *output* pada beberapa program kerja tertentu.

### 3. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian hasil program atau kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif.

Besarnya capaian kinerja dalam penelitian ini diperoleh dari persentase pencapaian fisik kegiatan yang terdapat di LAKIP Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba. Untuk mendeskripsikan pengukuran kinerja dari elemen efektivitas, maka disajikan deskripsi data dari program – program kerja yang terdapat pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bulukumba periode tahun 2014 - 2016. (lihat Tabel III pada lampiran)

Berdasarkan data tabel 3 yang terdapat pada lampiran diketahui bahwa program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba belum memenuhi elemen efektivitas selama tahun 2015 – 2016 dengan rata-rata rasio berkisar di 90%. Berbeda jika dibandingkan pada tahun 2014 yang memenuhi elemen efektivitas, dimana seluruh program kerjanya mencapai tingkat rasio efektivitas sebesar 100%, artinya seluruh kegiatan yang dilakukan telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan jumlah program kerja dan terdapat beberapa program yang nilai capaian fisiknya tidak sesuai dengan target yang ditentukan sebelumnya (100%).

Berdasarkan uraian di atas dapat ditampilkan dalam tabel 5.3 rekapitulasi rasio efektivitas program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba tahun 2014 – 2016, sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Rekapitulasi Rasio Efektivitas**  
**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2016**

T A H U N	Rasio Efektivitas (%)		
	Target	Capaian	Efektivitas
2014	100.00	100.00	100.00
2015	100.00	99.96	99.96
2016	100.00	96.76	96.76

Sumber : LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, diolah (2017)

Berdasarkan data pada tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba tahun 2014 memenuhi elemen efektivitas dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba belum memenuhi elemen efektivitas dengan rata-rata rasio masing – masing sebesar 99.96% dan 96.76%. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, yaitu adanya perbedaan program kerja dengan bertambahnya program kerja tiap tahunnya, selain itu terjadi penurunan nilai capaian fisik dari target yang telah ditentukan sebelumnya (100%).

## **B. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengukuran kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2014-2016 menggunakan metode *value for money*. Metode *value for money* ini terbagi menjadi tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, efektivitas. Berdasarkan hasil analisis data, maka hasil pembahasan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Pengukuran Ekonomi**

Pengukuran ekonomi bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2014-2016 dalam memperoleh dan mengelola sumber daya (*input*) yang dibutuhkan agar dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Keekonomian suatu kegiatan tidak hanya dilihat dari besarnya penghematan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, tetapi juga harus mempertimbangkan keluaran (*output*) yang

dihasilkan. Penghematan menjadi berkurang maknanya jika keluaran (*output*) yang dihasilkan tidak sesuai target atau tidak dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan hasil analisis data atas pengukuran rasio ekonomi terhadap program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba diketahui bahwa telah memenuhi elemen ekonomis. Hal ini dapat dilihat dari total anggaran yang disediakan tiap tahunnya, tidak habis terpakai dalam memenuhi seluruh program kerja setiap tahunnya, dengan nilai rata-rata *output* yang dihasilkan hampir mencapai maksimal, yaitu sebesar 95,81 % tahun 2014, 98,10% tahun 2015 dan 94,11% tahun 2016.

Tahun 2014 merupakan tahun dengan penghematan anggaran terbesar, dari total anggaran sebesar Rp.1.962.137.000,- dan pada pelaksanaan kegiatannya anggaran yang dipakai hanya Rp.1.852.520.550,-. Berarti telah terjadi penghematan anggaran sebesar Rp. 109.616.450,-. Pada tahun 2015 total anggaran yang disediakan yaitu sebesar Rp.3.146.773.976,- dan pada proses pelaksanaan program kerjanya yaitu sebesar Rp. 3.125.957.576,- dengan penghematan anggaran sebesar Rp. 20.816.400,- meski penghematan anggaran tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya tapi nilai rata – rata *output* seluruh program kerjanya hampir mencapai maksimal, yaitu sebesar 98,10 % bahkan terjadi penambahan 1 program kerja baru dari tahun sebelumnya (5 program). Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2016 dalam menjalankan program kerjanya dapat dikatakan ekonomis. Pada periode tahun 2016 dana yang dianggarkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba untuk menjalankan 6

program kerjanya sebesar Rp. 3.876.336.500,- sedangkan pada pelaksanaannya, dana yang digunakan hanya sebesar Rp. 3.550.017.250,- sehingga terjadi penghematan anggaran yaitu sebesar Rp. 326.319.250,-. Dari keseluruhan sisa anggaran tersebut dari tahun 2014 hingga 2016, sisa anggaran tersebut di kembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bulukumba

## 2. Pengukuran Efisiensi

Pengukuran efisiensi bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba dalam menggunakan sumber daya (*input*) yang tersedia untuk menghasilkan keluaran (*output*) berupa pelayanan di bidang pertanian dan peternakan. Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian dari pengukuran efisiensi berdasarkan program kerja yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis data pengukuran rasio efisiensi pada program kerja periode tahun 2014 – 2016 diketahui bahwa untuk periode tahun 2014 dapat dikatakan efisien. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba dapat meminimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam hal ini anggaran yang digunakan hanya 95,81 % dari total anggaran yang disediakan, dengan keluaran (*output*) tiap program kerja mampu mencapai 100% sehingga menghasilkan nilai rata – rata rasio efisiensi sebesar 104,38 %.

Untuk tahun 2015, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan program kerjanya dapat dikatakan efisien meski tahun ini terjadi 1 penambahan program kerja (5 program). Dengan penggunaan *input* yang hampir maksimal yaitu 98,10% dan *output* yang dihasilkan tidak mencapai 100% yaitu hanya 99,96% akan tetapi nilai rata – rata yang

diperoleh dari keseluruhan program kerja yang ada mampu mencapai di atas 100% yaitu 101,90%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini dalam setiap menjalankan kegiatannya dapat menghasilkan *output* sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menghemat penggunaan sumber daya (*input*) yang dalam hal ini adalah anggaran. Dari 5 program kerja terdapat 2 program kerja yang tidak mencapai *output* maksimal (100%) yaitu 1) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan nilai *output* yang didapat sebesar 99,84% hal tersebut diakibatkan adanya sisa belanja dari anggaran yang di alokasikan. 2) Program Peningkatan Mutu Layanan Pusat Kesehatan Hewan dengan nilai *output* yang didapat sebesar 99,98% hampir mencapai maksimal. Dengan nilai *output* yang tidak maksimal (100%) program kerja ini merupakan program kerja baru yang ditambahkan dari 4 program kerja sebelumnya. Sehingga dalam realisasinya belum dapat maksimal diakibatkan karena adanya sisa tender dari anggaran yang dialokasikan dan Kegiatan ini bersumber dari dana DAK. Meskipun demikian, nilai rata – rata keseluruhan program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba untuk tahun 2015 mampu mencapai di atas 100% yaitu 101,90% dan dapat dikatakan telah berjalan secara efisien.

Untuk tahun 2016, kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba juga dinyatakan efisien hal ini dibuktikan dengan nilai rata – rata rasio efisiensi yang diperoleh sebesar 102,81% padahal di tahun ini juga terjadi penambahan 1 program kerja (6 program). Meski terjadi penambahan program kerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba tetap mampu meminimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam hal ini

anggaran yang digunakan hanya (*input*) 94,11% dengan keluaran (*output*) sebesar 91,76 %. Adapun program kerja tambahan di tahun 2016 yaitu Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan & Non Pangan Asal Hewan dengan penggunaan *input* yang sebesar 98,55% dan nilai *output* yang didapatkan mencapai maksimal yaitu 100%. Sementara program kerja yang memiliki nilai *output* terendah pada tahun 2016 yaitu Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak sebesar 80,54% dengan nilai *input* 78,53%. Meskipun demikian, nilai rata – rata efisiensi program kerja selama tahun 2016 mampu mencapai di atas 100% yaitu 102,81% sehingga dapat dikatakan telah memenuhi efisiensi.

### 3. Pengukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba dalam mencapai tujuan atau target kebijakan dari suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah pembahasan hasil penelitian dari pengukuran efektivitas berdasarkan program kerja yang diteliti.

Kinerja program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2014 s/d 2016 dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat melalui tabel rekapitulasi 5.3 dimana nilai capaian dan target yang didapatkan mencapai nilai maksimal (100%) untuk tahun 2014, sementara periode berikutnya yaitu tahun 2015 dan 2016 nilai rasio efektivitas yang diperoleh yaitu sebesar 99,96% dan 96,76% meski tidak mencapai nilai maksimal kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba dapat dikatakan sangat

efektif sesuai dengan penilaian persentase yang diperoleh. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan program kerjanya telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Berdasarkan pembahasan mengenai pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2014 – 2016, maka dapat dibuat tabel rasio secara keseluruhan sebagai berikut :

**Tabel 5.4**  
**Rasio Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas**  
**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2014 – 2016**

T A H U N	Rasio		
	Ekonomi (Rp)	Efisiensi (%)	Efektivitas (%)
2014	109,616,450	104.38	100.00
2015	20,816,400	101.90	99.96
2016	326,319,250	102.81	96.76

Sumber : LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba, diolah (2017)

Dari tabel 5.4 di atas diketahui bahwa kinerja program kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba tahun 2014 s/d 2016 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini dapat ditunjukkan oleh nilai rata – rata rasio efisiensi dan efektivitas yang diperoleh yang mencapai angka 90% - 100% berdasarkan persentase penilaian pada halaman 45 dimana hal ini sangat efisien dalam mengelola anggaran yang dialokasikan dan efektivitas program kerja yang

dimiliki telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan dan dibarengi dengan terjadinya penghematan anggaran di setiap tahunnya (ekonomis).

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi dan efektivitas (3E) telah memenuhi syarat *value for money* dimana setiap elemen mencapai nilai rasio yang mencapai maksimal (100%) dan disertai pula penghematan anggaran setiap tahunnya (ekonomis). Pada tahun 2014 terjadi penghematan anggaran sebesar Rp 109.616.450 dengan nilai rasio efisiensi yang diperoleh 104,38% dan nilai rasio efektivitas sebesar 100%. Di tahun 2015 total penghematan anggaran sebesar Rp 20.816.400 dengan nilai rasio efisiensi 101,90% dan nilai rasio efektivitas yaitu 99,96%. Sementara tahun 2016 total penghematan anggaran yaitu Rp 326.319.250 dengan nilai rasio efisiensi yang diperoleh 102,81% dan nilai rasio efektivitas 96,76%. Sehingga dapat dinyatakan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba selama periode 2014 – 2016 telah memenuhi syarat *value for money* dimana setiap anggaran yang dialokasikan mampu dikelola secara tepat dalam menjalankan setiap program kerja yang dimilikinya.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan di atas adalah sebagai berikut :

Hendaknya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba dari segi ekonomis dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun berikutnya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumbadiharapkan dapat menghasilkan output yang lebih. Penggunaan anggaran yang tidak melebihi dari yang telah ditetapkan bukan merupakan satu-satunya patokan penilaian kinerja melainkan harus dibandingkan dengan *output* yang telah dihasilkan.

Apabila ada peneliti lain tertarik mengadakan penelitian yang hampir sama, sebaiknya mengambil sampel yang lebih luas, agar generalisasi dapat dilakukan dengan baik dan selain 3 elemen rasio (ekonimi, efisiensi, efektivitas) yang dijadikan patokan penilaian kinerja dalam penelitian ini, peneliti menyarankan rasio lain sebagai pendukung ketiga rasio tersebut seperti rasio kemandirian dan rasio keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, Isna. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol 15 No.1.
- Astuti, Tri Afiati. 2011. *Analisis Value For Money pada Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Semarang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Aulia, Demi A. 2014. *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. BPFE. Yogyakarta.
- Budiarto, Bambang. 2007. *Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Cahya, Nindy Feriska S. 2014. *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Negeri Surabaya.
- Desak, I Made Ita Purnamasari. 2014. *Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan Value For Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011*. E-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Manajemen Vol.2.
- Kadafi, Laode. 2012. *Pengukuran Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang*. Jurnal Ilmiah. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi IV. BPFE: Yogyakarta.
- Meri, Afsita. 2013. *Analisis Value For Money dan Akuntabilitas dalam meningkatkan pelayanan publik pada PDAM Tirta Musi Palembang*. Jurnal Ilmiah STIE MDP.
- Putra, Renaldi. 2014. *Penerapan Konsep Value For Money Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Polres Ogan Ilir*. Jurnal Ilmiah. Universitas Bina Darma.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M.J. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Purnomo, Agus Adi Putra. 2015. *Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. P 252-268.
- Robbins, Stephen. P. 1997. *Essentials of Organizational Behaviour, Fifth Edition, Prentice Hall International, Inc*. New Jersey.
- Saputra, Harry L. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangehe Menggunakan Metode Value For Money*. Jurnal EMBA. Universitas Samratulangi Manado. Vol 2, No.3 P 1686 – 1694.
- Septiana, Dian. 2016. *Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Usaha Jamur Tiram (Pleurotus Ostreatus)*. Forum Bisnis dan Kewirausahaan. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Vol 5 No.2 P 130 – 137.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Tarsito. Bandung
- Sulastiningsih. 2015. *Pengukuran Kinerja Berbasis Value For Money Studi Pada SMP Negeri 2 Banjarnegara*. Jurnal Kajian Bisnis. Vol 23, No. 1 P. 1-13.

# LAMPIRAN

**Tabel 1**  
**Pengukuran Ekonomi**  
**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2014 – 2015**

N O	Program Kerja	Tahun 2014 (Rupiah)				Tahun 2015 (Rupiah)			
		Anggaran	Realisasi	Out put	Sisa Anggaran	Anggaran	Realisasi	Out put	Sisa Anggaran
<b>1</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>570,577,250</b>	<b>540,258,350</b>	<b>94.69</b>	<b>30,318,900</b>	<b>248,231,426</b>	<b>245,799,676</b>	<b>99.02</b>	<b>2,431,750</b>
a	Pendataan Masalah Peternakan	336,746,500	307,722,350	91.38	29,024,150	22,000,000	21,000,000	95.45	1,000,000
b	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	32,940,000	32,632,500	99.07	307,500	28,957,300	28,576,800	98.69	380,500
c	Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endemik	74,777,500	74,770,500	99.99	7,000	52,238,600	51,908,600	99.37	330,000
d	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	90,274,750	89,294,500	98.91	980,250	99,822,026	99,618,026	99.80	204,000
e	Penanganan Penyakit Reproduksi dan Penyakit Ternak	35,838,500	35,838,500	100.00	-	45,213,500	44,696,250	98.86	517,250
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>1,213,880,750</b>	<b>1,138,736,900</b>	<b>93.81</b>	<b>75,143,850</b>	<b>1,860,888,050</b>	<b>1,854,202,400</b>	<b>99.64</b>	<b>6,685,650</b>
a	Pembibitan dan Perawatan Ternak	335,357,000	279,853,150	83.45	55,503,850	375,545,500	369,545,500	98.40	6,000,000
b	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	717,529,250	697,889,250	97.26	19,640,000	1,253,772,100	1,253,771,450	100.00	650

	1) Pengadaan Bibit Sapi Bali	633,750,000	633,750,000	100.00	-	837,400,350	837,400,350	100.00	-
	2) Pengadaan Ayam Kampung Unggul	50,000,000	50,000,000	100.00	-	239,005,000	239,005,000	100.00	-
	3) Pengadaan Ternak Kambing	25,000,000	25,000,000	100.00	-	165,625,000	165,625,000	100.00	-
	4) Pengadaan Obat-obatan dan Vaksin	2,319,250	2,319,250	100.00	-	7,121,750	7,121,100	99.99	650
	5) Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-	-	4,620,000	4,620,000	100.00	-
c	Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan	87,584,000	87,584,000	100.00	-	154,636,000	153,951,000	99.56	685,000
	1) Pengadaan HMT	20,000,000	20,000,000	100.00	-	14,511,000	13,826,000	95.28	685,000
	2) Pengadaan Mesin Chopper / Mesin Vektor Mini Feed Milk	60,000,000	60,000,000	100.00	-	140,125,000	140,125,000	100.00	-
d	Penataan Ternak Pemerintah	52,783,000	52,783,000	100.00	-	55,703,000	55,703,000	100.00	-
e	Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan	20,627,500	20,627,500	100.00	-	21,231,450	21,231,450	100.00	-
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>78,799,000</b>	<b>74,645,300</b>	<b>94.73</b>	<b>4,153,700</b>	<b>42,048,500</b>	<b>39,348,500</b>	<b>93.58</b>	<b>2,700,000</b>
a	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	78,799,000	74,645,300	94.73	4,153,700	42,048,500	39,348,500	93.58	2,700,000
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	<b>98,880,000</b>	<b>98,880,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>123,331,000</b>	<b>122,331,000</b>	<b>99.19</b>	<b>1,000,000</b>
a	Pengadaan Sarana dan	98,880,000	98,880,000	100.00	-	123,331,000	122,331,000	99.19	1,000,000

	Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna								
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Layanan Pusat Kesehatan Hewan</b>	-	-	-	-	<b>872,275,000</b>	<b>864,276,000</b>	<b>99.08</b>	<b>7,999,000</b>
a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	-	-	-	-	872,275,000	864,276,000	99.08	7,999,000
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan Asal Hewan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
a	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1,962,137,000</b>	<b>1,852,520,550</b>	<b>95.81</b>	<b>109,616,450</b>	<b>3,146,773,976</b>	<b>3,125,957,576</b>	<b>98.10</b>	<b>20,816,400</b>

Sumber : LAKIP Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba (diolah), 2017

N O	Program Kerja	Tahun 2016 (Rupiah)			
		Anggaran	ReaLisasi	Output	Sisa Anggaran
<b>1</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>543,546,500</b>	<b>426,850,250</b>	<b>78.53</b>	<b>116,696,250</b>
a	Pendataan Masalah Peternakan	303,367,500	194,080,750	63.98	109,286,750
b	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	31,451,000	28,901,000	91.89	2,550,000

c	Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endemik	51,354,250	51,088,250	99.48	266,000
d	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	95,444,500	92,243,500	96.65	3,201,000
e	Penanganan Penyakit Reproduksi dan Penyakit Ternak	61,929,250	60,536,750	97.75	1,392,500
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>2,276,580,500</b>	<b>2,081,732,500</b>	<b>91.44</b>	<b>194,848,000</b>
a	Pembibitan dan Perawatan Ternak	187,140,500	185,515,500	99.13	1,625,000
b	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	<b>1,934,985,000</b>	<b>1,744,920,000</b>	<b>90.18</b>	<b>190,065,000</b>
	1) Pengadaan Bibit Sapi Bali	720,250,000	684,700,000	95.06	35,550,000
	2) Pengadaan Ayam Kampung Unggul	541,875,000	457,980,000	84.52	83,895,000
	3) Pengadaan Ternak Kambing	628,000,000	557,380,000	88.75	70,620,000
	4) Pengadaan Obat-obatan dan Vaksin	26,580,000	26,580,000	100.00	-
	5) Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	18,280,000	18,280,000	100.00	-
c	Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan	<b>72,849,000</b>	<b>72,116,000</b>	<b>98.99</b>	733,000
	1) Pengadaan HMT	48,000,000	48,000,000	100.00	-
	2) Pengadaan Mesin Chopper / Mesin Vektor Mini Feed Milk	20,000,000	20,000,000	100.00	-
d	Penataan Ternak Pemerintah	55,781,000	55,781,000	100.00	-
e	Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan	25,825,000	23,400,000	90.61	2,425,000
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>25,096,500</b>	<b>25,096,500</b>	<b>100.00</b>	-
a	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	25,096,500	25,096,500	100.00	-
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	<b>81,113,000</b>	<b>77,993,000</b>	<b>96.15</b>	<b>3,120,000</b>

a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	81,113,000	77,993,000	96.15	3,120,000
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Layanan Pusat Kesehatan Hewan</b>	<b>144,645,000</b>	<b>144,645,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
					-
a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	144,645,000	144,645,000	100.00	-
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengawasan Produk Pangan dan Non Pangan Asal Hewan</b>	<b>805,355,000</b>	<b>793,700,000</b>	<b>98.55</b>	<b>11,655,000</b>
					-
a	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	805,355,000	793,700,000	98.55	11,655,000
	<b>J U M L A H</b>	<b>3,876,336,500</b>	<b>3,550,017,250</b>	<b>94.11</b>	<b>326,319,250</b>

Sumber : LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba (diolah), 2017

**Tabel 2**  
**Pengukuran Efisiensi**  
**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba**  
**Tahun 2014 – 2016**

N O	Program Kerja	2014 (%)		Efisiensi Output	2015 (%)		Efisiensi Output	2016 (%)		Efisiensi Output
		Input	Output		Input	Output		Input	Output	
<b>1</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	<b>94.69</b>	<b>100.00</b>	<b>105.61</b>	<b>99.02</b>	<b>99.84</b>	<b>100.83</b>	<b>78.53</b>	<b>80.54</b>	<b>102.56</b>
a	Pendataan Masalah Peternakan	91.38	100.00	109.43	95.45	100.00	104.76	63.98	65.16	101.85
b	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	99.07	100.00	100.94	98.69	100.00	101.33	91.89	100.00	108.82
c	Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endemik	99.99	100.00	100.01	99.37	100.00	100.64	99.48	100.00	100.52
d	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	98.91	100.00	101.10	99.80	100.00	100.20	96.65	100.00	103.47
e	Penanganan Penyakit Reproduksi dan Penyakit Ternak	100.00	100.00	100.00	98.86	99.11	100.26	97.75	99.94	102.24
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>93.81</b>	<b>100.00</b>	<b>106.60</b>	<b>99.64</b>	<b>100.00</b>	<b>100.36</b>	<b>91.44</b>	<b>100.00</b>	<b>109.36</b>
a	Pembibitan dan Perawatan Ternak	83.45	100.00	119.83	98.40	100.00	101.62	99.13	100.00	100.88
b	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	97.26	100.00	102.81	100.00	100.00	100.00	90.18	100.00	110.89
	1) Pengadaan Bibit Sapi Bali	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.06	100.00	105.19
	2) Pengadaan Ayam Kampung Unggul	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.52	100.00	118.32

	3) Pengadaan Ternak Kambing	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.75	100.00	112.67
	4) Pengadaan Obat-obatan dan Vaksin	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	100.01	100.00	100.00	100.00
	5) Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
c	Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan	100.00	100.00	100.00	99.56	100.00	100.44	98.99	100.00	101.02
	1) Pengadaan HMT	100.00	100.00	100.00	95.28	100.00	104.95	100.00	100.00	100.00
	2) Pengadaan Mesin Chopper / Mesin Vektor Mini Feed Milk	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
d	Penataan Ternak Pemerintah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
e	Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.61	100.00	110.36
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>94.73</b>	<b>100.00</b>	<b>105.56</b>	<b>93.58</b>	<b>100.00</b>	<b>106.86</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
a	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	94.73	100.00	105.56	93.58	100.00	106.86	100.00	100.00	100.00
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.19</b>	<b>100.00</b>	<b>100.82</b>	<b>96.15</b>	<b>100.00</b>	<b>104.00</b>
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	100.00	100.00	100.00	99.19	100.00	100.82	96.15	100.00	104.00
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Layanan Pusat Kesehatan Hewan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99.08</b>	<b>99.98</b>	<b>100.91</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	-	-	-	99.08	99.98	100.91	100.00	100.00	100.00
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengawasan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.55</b>	<b>100.00</b>	<b>101.47</b>

	<b>Produk Pangan dan Non Pangan Asal Hewan</b>									
a	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	-	-	-	-	-	-	98.55	100.00	101.47
	<b>J U M L A H</b>	<b>95.81</b>	<b>100.00</b>	<b>104.38</b>	<b>98.10</b>	<b>99.96</b>	<b>101.90</b>	<b>94.11</b>	<b>91.76</b>	<b>102.81</b>

Sumber : LAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba (diolah), 2017



	3) Pengadaan Ternak Kambing	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	4) Pengadaan Obat-obatan dan Vaksin	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	5) Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
c	Penelitian dan Pengolahan Gizi Pakan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	1) Pengadaan HMT	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	2) Pengadaan Mesin Chopper / Mesin Vektor Mini Feed Milk	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
d	Penataan Ternak Pemerintah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
e	Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	<b>100.00</b>								
a	Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	<b>100.00</b>								
a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Layanan Pusat Kesehatan Hewan</b>	-	-	-	<b>100.00</b>	<b>99.98</b>	<b>99.98</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
a	Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	-	-	-	100.00	99.98	99.98	100.00	100.00	100.00
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengawasan</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

	<b>Produk Pangan dan Non Pangan Asal Hewan</b>									
a	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)	-	-	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00
	<b>J U M L A H</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>99.96</b>	<b>99.96</b>	<b>100.00</b>	<b>96.76</b>	<b>96.76</b>